

Determinasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh: Perspektif PDRB, inflasi dan investasi

Sulis Tia Wati, Iskandar*, Safuridar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra Langsa, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: iskandarmsi@unsam.ac.id)

Abstract

This study examines how gross regional domestic product (GRDP), inflation, and investment affect local tax revenue in Aceh Province. The analysis uses secondary time-series data from Statistics Indonesia (BPS) Aceh Province and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) covering 2010–2024. Multiple linear regression was employed to test both the partial and joint effects of the independent variables on local tax revenue. The results indicate that GRDP and investment have positive, statistically significant effects on local tax revenue in Aceh, while inflation has a negative, statistically insignificant effect. Taken together, GRDP, inflation, and investment jointly influence local tax revenue. These findings suggest that strengthening regional economic activity and increasing investment are important levers for improving local tax revenue performance in Aceh. In addition, local governments should enhance tax administration, taxpayer compliance, and enforcement to ensure that gains in economic activity and investment translate more effectively into higher local tax receipts.

Keywords: Gross Regional Domestic Product, Inflation, Investment, Local Taxes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan investasi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan data sekunder deret waktu (time series) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada periode 2010–2024. Analisis dilakukan dengan metode regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial maupun simultan variabel independen terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh, sedangkan inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, PDRB, inflasi, dan investasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan aktivitas ekonomi daerah dan peningkatan investasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan pemungutan agar kenaikan aktivitas ekonomi dan investasi dapat lebih efektif dikonversi menjadi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: Produk Domestik Regioanl Bruto, Inflasi, Investasi, Pajak Daerah

How to cite: Wati, S. T., Iskandar, I., & Safuridar, S. (2025). Determinasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh: Perspektif PDRB, inflasi dan investasi. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 707–720. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2498>

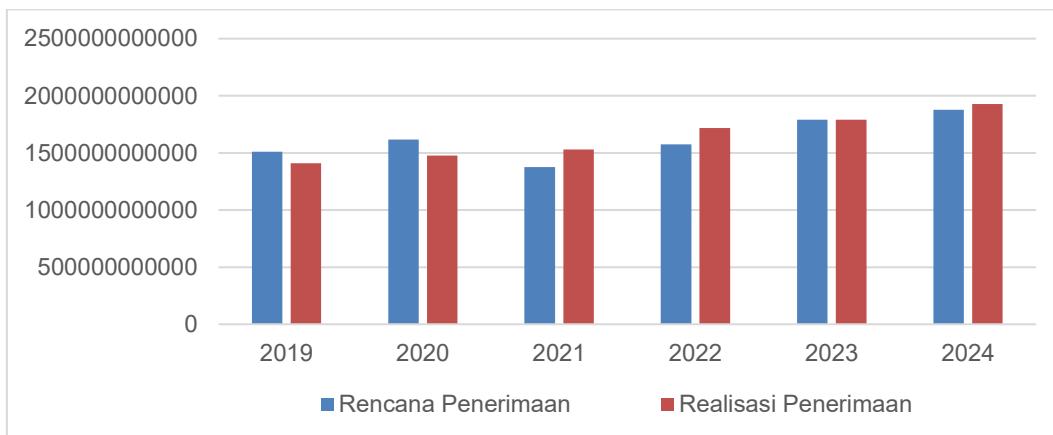


Copyright © 2025 by Authors; this is an open-access article under the CC BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh status Otonomi khusus, yang memberikan kewenangan luas dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi PAD, terutama melalui komponen-komponen utama seperti pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada masyarakat dan pelaku usaha di suatu wilayah administrasi, yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah berfungsi sebagai salah satu instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam konteks ini, penerimaan pajak daerah berperan strategis sebagai sumber pendanaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur serta fasilitas umum yang memadai. Peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas publik diyakini dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain melalui penyempurnaan sistem administrasi, peningkatan transparansi pengelolaan pajak, dan penguatan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Tren data penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh selama periode 2019 hingga 2024 dapat sebagaimana pada Gambar 1.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, (2023)

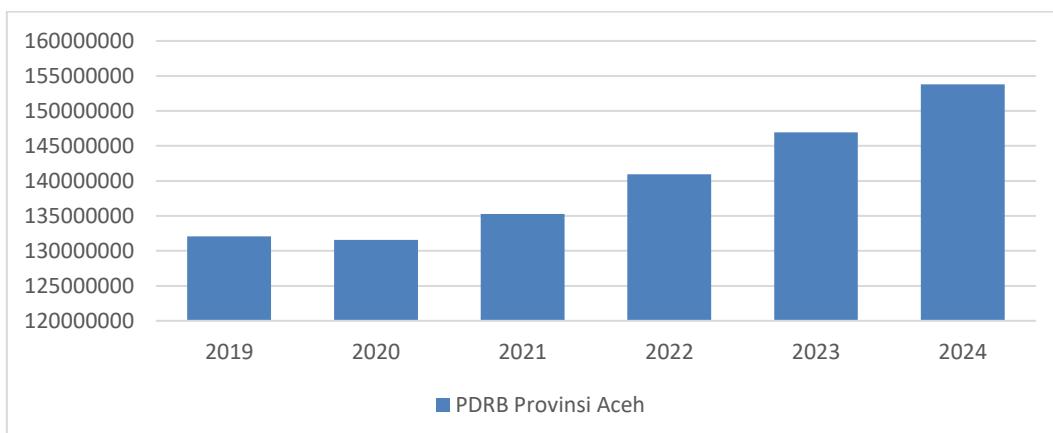
Gambar 1. Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Aceh tahun 2019-2024

Pada Gambar 1, penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, capaian realisasi penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi tersebut terlihat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2019 pajak daerah sebesar Rp.1.509.791.063.991 namun realisasi yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.1.409.251.915.061. Pada tahun 2020 pajak daerah sebesar Rp.1.617.438.860.000 namun realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp.1.477.991.066.970. yang secara

umum dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini mencerminkan adanya tekanan fiskal akibat perlambatan ekonomi selama pandemi, yang berdampak pada kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, pada periode 2021–2024 realisasi pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu pada tahun 2021 target Rp1.374.555.532.889 dengan realisasi Rp1.529.610.318.108; tahun 2022 target Rp1.574.358.019.378 dengan realisasi Rp1.717.834.522.320; tahun 2023 target Rp1.789.594.978.388 dengan realisasi Rp1.791.227.845.430; serta tahun 2024 target meningkat signifikan menjadi Rp1.877.493.725.719 dengan realisasi Rp1.929.017.709.830.

Penerimaan pajak daerah tidak lepas dari pengaruh sejumlah variabel seperti Produk Domestik Regional Bruto, inflasi dan investasi. Ketiga variabel tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahun. Ketiga variabel tersebut menjadi indikator dalam memproyeksi potensi penerimaan pajak daerah. Salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi daerah adalah pertumbuhan PDRB, baik dihitung berdasarkan harga berlaku maupun konstan (Saniah & Murtala, 2024).

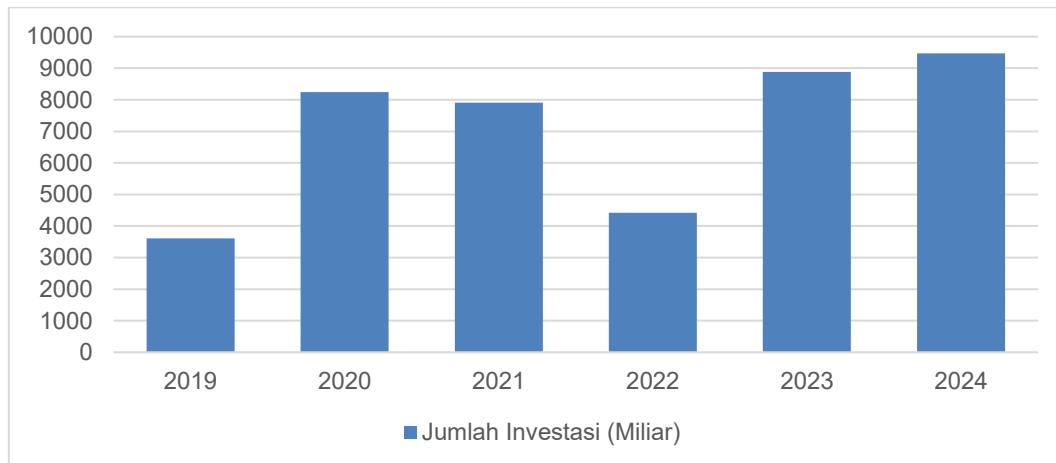
PDRB merupakan indikator makroekonomi yang menggambarkan total nilai tambah bersih yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah administrasi, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam periode tertentu (umumnya satu tahun). Karena merefleksikan produktivitas ekonomi daerah, PDRB sering dijadikan acuan untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi regional. Pertumbuhan PDRB menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berpotensi mendorong perbaikan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperbesar basis pajak daerah, mengingat banyak sektor penyusun PDRB juga menjadi objek pajak daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB berkaitan erat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tren data nilai PDRB Provinsi Aceh pada periode 2019–2024 sebagaimana pada Gambar 2.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, (2023)
Gambar 2. Jumlah PDRB Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan Gambar.2, bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Aceh tahun 2019 sebesar Rp. 132.069.570,80. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 131.580.967,16, hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi yang terjadi pada produk domestik regional bruto. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dampak pandemi global pada tahun 2020 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2021 PDRB mengalami peningkatan sebesar Rp.135.251.193,84. Pada tahun berikutnya 2022 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar Rp.140.947.643,60. Kemudian pada tahun 2023 jumlah PDRB sebesar Rp.146.930.000,00. Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.153.780.000,00. Hal ini disebabkan oleh pemulihan aktivitas ekonomi sehingga PDRB di Aceh terus mengalami peningkatan.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah tingkat inflasi. Secara konseptual, inflasi merujuk pada kecenderungan umum peningkatan harga barang dan jasa dalam periode waktu yang relatif panjang, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, inflasi dianggap sebagai akibat dari kelebihan permintaan yang tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Ketika jumlah uang yang beredar melebihi kapasitas produksi barang, maka akan timbul tekanan harga yang menyebabkan inflasi. Kondisi inflasi yang demikian berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal, yang pada akhirnya juga memengaruhi basis perpajakan daerah. Tren data mengenai tingkat inflasi di Provinsi Aceh selama periode 2019 hingga 2024 tersajikan pada Gambar 3.



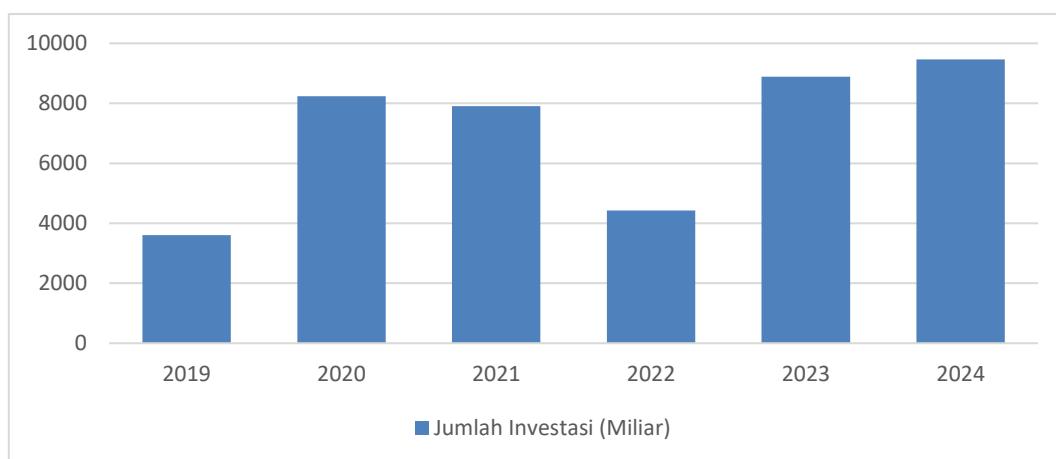
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2024)
 Gambar 3. Tingkat Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Terbukti bahwa tingkat inflasi di Provinsi Aceh dikategorikan sebagai inflasi ringan, dengan ketentuan tingkat inflasi berada di bawah 10%. Pada tahun 2019 inflasi sebesar 1,69, pada tahun selanjutnya 2020 inflasi mengalami peningkatan sebesar 3,59. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan 2,24. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 5,89. Pada tahun 2023 mengalami tren penurunan sebesar 1,53. Dan pada tahun 2024 inflasi di Aceh kembali meningkat sebesar 2,17. Pengaruh positif dari inflasi, atau inflasi ringan, dapat dianggap sebagai pendorong bagi perekonomian yang lebih kuat, yang mengarah pada peningkatan

pendapatan nasional dan menumbuhkan rasa keterlibatan ekonomi di antara penduduk. Inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi) dapat menyebabkan kekacauan ekonomi dan penurunan produktivitas ekonomi, sehingga pegawai negeri, pegawai swasta, dan buruh yang merupakan mayoritas penduduk, akan mengurangi konsumsi mereka karena harga-harga yang tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi pajak daerah adalah investasi. Investasi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, termasuk dari sisi penerimaan pajak. Investasi yang dikelola secara efektif memiliki peran strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan (Imansyah et al., 2024).

Investasi dapat diartikan sebagai penempatan dana atau barang, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, dalam jangka waktu tertentu dalam tujuan memperoleh manfaat ekonomi. Dari sudut pandang pemerintah daerah, peningkatan investasi dapat memperluas basis ekonomi lokal dan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui berbagai jenis pajak yang dikenakan terhadap aktivitas ekonomi yang berkembang (Rizaldi & Guspul, 2021). Adapun tren data mengenai investasi di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)
 Gambar 4. Jumlah Investasi Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 (miliar)

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa investasi di Provinsi Aceh telah menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019 investasi di Aceh sebesar 3.606,90 miliar pada tahun selanjutnya 2020 mengalami peningkatan sebesar 8.241,10 miliar. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7.904,70 miliar. Pada tahun 2022 mengalami tren penurunan sebesar 4.424,20 miliar. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 8.883,30 miliar. Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 9.467,80 miliar. Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, terutama kualitas dan ketersediaan infrastruktur, terutama di sektor-sektor seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Keberadaan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk menarik investasi, karena investor mungkin ragu untuk berinvestasi di daerah yang infrastrukturnya kurang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Nicola dan Saleh (2023) penelitian tersebut berfokus pada tiga variabel utama, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Sementara itu, studi sebelumnya oleh Astuti et al. (2022) mengkaji jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi, namun terbatas pada periode analisis selama lima tahun. Perbedaan dalam variabel yang digunakan, rentang waktu penelitian, serta lokasi geografis menjadi indikasi adanya kesenjangan penelitian yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan identifikasi terhadap latar belakang rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah PDRB, inflasi dan investasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PDRB, inflasi dan investasi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperluas pemahaman mengenai fiskal daerah serta memperkuat basis kebijakan pemerintah daerah dalam optimalisasi pendapatan melalui sektor perpajakan.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat manfaat timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pada umumnya, tugas pajak daerah lebih fokus pada pembagian sumber daya untuk menyediakan layanan publik. Tugas regulasi untuk mengawasi. Dengan demikian, fungsi pajak daerah dapat dibagi menjadi dua fungsi utama yaitu penerimaan dan pengaturan.

Menurut ketentuan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah. Kontribusi tersebut bersifat memaksa dengan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, namun digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta penyediaan fasilitas publik. Keberadaan sarana dan prasarana umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tidak dapat terwujud tanpa adanya penerimaan dari pajak daerah tersebut (Putra et al., 2018).

Struktur pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota, maka penetapan pajak daerah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak daerah kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan program pembangunan di daerah (Lumy et al., 2018).

Pengaruh Produk domestik regional bruto dan penerimaan pajak daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan suatu indikator neraca makroekonomi yang dihitung secara sistematis,

konsisten, dan terintegrasi. Perhitungan ini dilakukan dengan merujuk pada konsep, definisi, klasifikasi, serta metodologi yang telah diakui secara internasional. Secara umum, PDRB menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan dari total aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu perubahan harga (inflasi atau deflasi) serta perubahan volume produksi. Sehubung dengan itu, dikenal dua jenis pendekatan dalam mengatur nilai PDRB, yaitu:

1. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga kosntan digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, karena indikator ini menghilangkan pengaruh perubahan harga barang dan jasa. Dengan demikian, perhitungan ini dapat mencerminkan perubahan volume produksi secara lebih akurat, tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang bersifat nominal.
2. Produk domestik regional bruto atas harga berlaku disusun untuk menunjukkan struktur ekonomi suatu wilayah pada periode tertentu serta pergeseran struktur tersebut dari waktu ke waktu. Nilai ini mencerminkan jumlah nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi di suatu daerah berdasarkan harga pasar yang berlaku pada periode bersangkutan.

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah dan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan PDRB menunjukkan kapasitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajak. Sesuai teori Peacock dan Wiseman, perluasan aktivitas ekonomi mendorong peningkatan basis pajak, sehingga penerimaan fiskal daerah meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui optimalisasi pajak daerah (Aji & Nugroho, 2021).

H1: Terdapat pengaruh signifikan variabel produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh

Inflasi dan penerimaan pajak daerah

Inflasi merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam perekonomian yang dapat terjadi baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini biasanya dipicu oleh dinamika serta perkembangan ekonomi yang menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa, sementara kapasitas produksi dan distribusi ekonomi belum mampu mengimbangi secara optimal. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai kondisi meningkatnya barang dan jasa secara menyeluruh dan berlangsung secara berkelanjutan. Istilah "umum" mengindikasikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang saja, melainkan meliputi sejumlah kelompok barang dan jasa yang menjadi konsumsi masyarakat luas. Inflasi dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain peningkatan konsumsi masyarakat, melimpahnya likuiditas di pasar yang mendorong pengeluaran, hingga ketidakseimbangan distribusi barang yang memicu spekulasi harga. Dalam hal ini, inflasi tidak hanya mencerminkan kenaikan harga semata, tetapi juga

menunjukkan adanya penurunan nilai riil dari mata uang yang beredar di masyarakat. Dengan kata lain, inflasi mencerminkan proses di mana daya beli uang menurun seiring dengan meningkatnya harga-harga secara agregat (Amaludin & Romadhina, 2023).

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam perekonomian. Kenaikan tingkat harga ini mengurangi daya beli masyarakat sehingga setiap unit ekonomi memperoleh barang lebih sedikit dengan jumlah uang yang sama. Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian daerah, termasuk menurunkan penerimaan pajak, karena aktivitas ekonomi dan konsumsi cenderung melemah. Apabila inflasi tidak terkendali, dapat terjadi ketidakstabilan ekonomi dan penurunan kinerja fiskal daerah (Aji & Nugroho, 2021).

H2: Terdapat pengaruh signifikan variabel inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh

Investasi dan penerimaan pajak daerah

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 menjelaskan apa itu investasi, menyatakan bahwa "investasi adalah penempatan sejumlah dana atau asset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk pembelian saham, surat utang, surat berharga, dan investasi langsung guna mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu" (Anggraeni & Gazali, 2019). Pada prinsipnya, investasi dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan sumber daya saat ini dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Untuk memudahkan pemahaman dan memudahkan perhitungan, investasi didefinisikan dalam beberapa cara. Investasi didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa depan (Alisman et al., 2022).

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Peningkatan investasi memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta menaikkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga basis pajak daerah turut bertambah. Sebaliknya, penurunan investasi dapat melemahkan aktivitas ekonomi dan menurunkan potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi faktor strategi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah (Mawar & Sroyer, 2021).

H3 : Terdapat pengaruh signifikan varibel investasi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berbentuk deret waktu (*time series*) yang dinyatakan dalam bentuk angka dan di analisis secara statistik dan sampel yang digunakan selama 15 tahun. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau publikasi resmi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta referensi ilmiah lain yang relevan dengan topik kajian.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Metode ini digunakan untuk melihat kontribusi masing-masing variabel bebas dalam menjelaskan variasi pada penerimaan pajak daerah. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan: Y = penerimaan pajak daerah; α = konstanta; β = koefisien regresi; X_1 = PDRB; X_2 = inflasi; X_3 = investasi; e = error term.

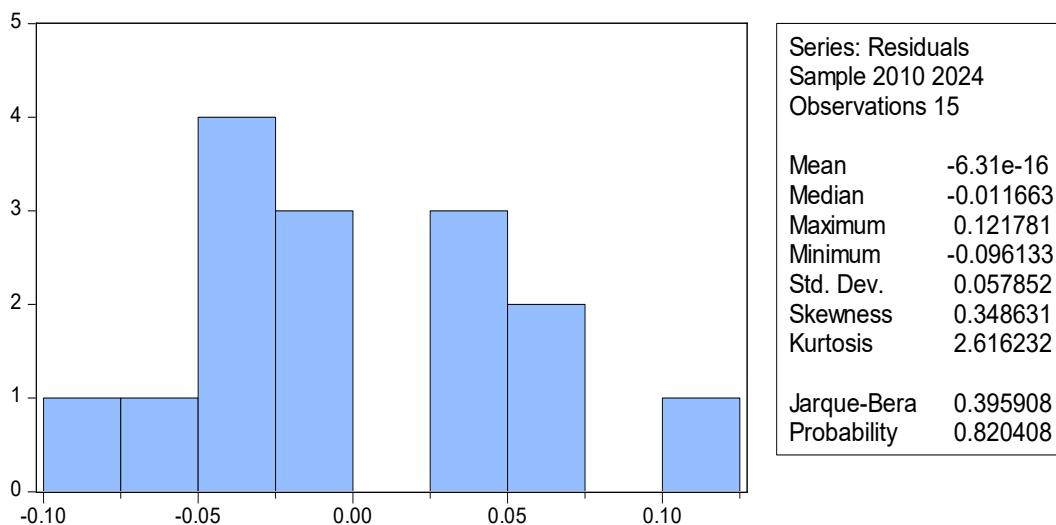
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menilai pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Nilai koefisien korelasi (R) menggambarkan tingkat keeratan hubungan tersebut, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 mencerminkan hubungan yang lemah. Sebelum estimasi model dilakukan, diperlukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dasar regresi, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dan autokorelasi guna memastikan model yang digunakan bersifat layak dan tidak menyimpang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas residual Gambar 5 adalah nilai jarquer-bere probability sebesar 0,820408 dimana $> 0,05$ (α). Maka dengan demikian bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal (lulus normalitas) karena nilai probability nya lebih besar dari level of significabce (α).



Gambar 5. Hasil Uji Normalitas

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas tersebut.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
Log (Pajak)	0,265241	61133,50	2,652661
Log (PDRB)	7,41E-05	4,646626	1,313799
Inflasi	0,001221	48,14637	2,398847

Uji Heteroskedastisitas

Tabel. 2 menunjukkan nilai prob. $0,6874 > 0,05$ yang berarti bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0,400731	Prob, F(3,11)	0,7553
Obs*R-squared	1,477840	Prob, Chi-Square(3)	0,6874
Scaled explained SS	0,930212	Prob, Chi-Square(3)	0,8181

Uji Autokorelasi

Tabel 3 menunjukkan nilai prob. $F(2,9)$ sebesar $0,3478 > 0,05$. Dalam konteks ini, Prob. F hitung memiliki nilai yang lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan sebesar $0,05$ (5%). Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM

F-statistic	1,190459	Prob, F(2,9)	0,3478
Obs*R-squared	3,138040	Prob, Chi-Square(2)	0,2082

Hasil Uji Hipotesis

Teknik yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB, inflasi dan investasi terhadap penerimaan pajak daerah adalah regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan Eviews 10. Berdasarkan regresi data yang dilakukan diperoleh seperti pada Tabel. 4.

Tabel. 4 Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3,824188	4,095249	-0,933811	0,3704
Log (PDRB) (X1)	1,929163	0,515015	3,745837	0,0032
Inflasi (X2)	-0,008984	0,008611	-1,043292	0,3192
Log (Investasi) (X2)	0,094446	0,034948	2,702429	0,0206
R-squared	0,897779			
Adjusted R-squared	0,869900			
F-statistic	32,20322			
Prob(F-statistic)	0,000010			

Berdasarkan Tabel. 4 hasil koefisien regresi dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -3,824188 + 1,929163 \log X1 - 0,008984 \log X2 + 0,094446 \log X3$$

Hasil dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. $\alpha = -3,824188$ menunjukkan bahwa jika produk domestik regional bruto, inflasi dan investasi bernilai nol atau tetap maka pajak daerah di Provinsi Aceh sebesar $-3,824188\%$ dengan asumsi variabel lainnya tetap.
2. Koefisien regresi produk domestik regional bruto (X1) sebesar 1,929163, artinya setiap peningkatan produk domestik regional bruto (X1) sebesar 1, maka akan meningkatkan pajak daerah sebesar 1,929163 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Koefisien regresi inflasi (X2) sebesar -0,008984, artinya setiap peningkatan inflasi (X2) sebesar 1, maka akan menurunkan pajak daerah sebesar 0,008984 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Koefisien regresi investasi (X3) sebesar 0,094446 artinya setiap peningkataan investasi (X3) sebesar 1, maka akan meningkatkan pajak daerah sebesar 0,094446 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Berdasarkan Tabel.4 pengujian ini menggunakan signifikan 5% hasil pengujian hipotesis independen secara persial terhadap variabel dependen dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Hasil estimasi koefisien variabel produk domestik regional bruto sebesar 1,929163 dan signifikan pada prob $0,0032 < \alpha = 0,05$, artinya secara persial produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. *Ceteris paribus*
2. Hasil estimasi koefisien variabel inflasi sebesar -0,008984 dan signifikan pada prob $0,3192 > \alpha = 0,05$, artinya secara persial inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. *Ceteris paribus*
3. Hasil estimasi koefisien variabel investasi sebesar 0,094446 dan signifikan pada prob $0,0206 < \alpha = 0,05$, artinya secara persial investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. *Ceteris paribus*

Selain itu diketahui hasil koefisien determinan dapat dilihat yaitu Adjusted R-squared = 0,869900, yang artinya seluruh variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan investasi memengaruhi variabel dependen yaitu pajak daerah sebesar 86,99% sisanya 13,01% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB berkontribusi pada meningkatnya pendapatan pajak daerah. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam kenaikan PDRB mendorong peningkatan pendapatan masyarakat untuk membayar serta intensitas transaksi ekonomi, sehingga jumlah objek pajak dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak meningkat (Sania, 2018). Misalnya, perkembangan sektor perdagangan, jasa, serta industri pariwisata dan perhotelan di Aceh berperan dalam

memperluas basis pajak daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui peningkatan PDRB secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini didukung Alfaisyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak daerah di Provinsi Aceh. Artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap pajak daerah di Provinsi Aceh. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa sehingga daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan tetap, cenderung menurun. Namun, bagi kelompok dengan pendapatan lebih tinggi, pengaruh inflasi relatif kecil karena pola konsumsi mereka tidak banyak berubah. Kondisi ini membuat penerimaan pajak daerah tetap stabil, sehingga peningkatan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap besarnya pajak daerah yang diterima (Saputra, 2018). Penelitian ini didukung oleh penelitian Triastuti dan Pratomo (2016) dan Putra et al. (2018) yang menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pajak daerah.

Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi berkontribusi pada bertambahnya pendapatan pajak daerah. Investasi mendorong pembukaan lapangan kerja serta perkembangan berbagai sektor usaha, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan kemampuan membayar pajak semakin besar. Sebagai contoh, pengembangan pariwisata syari'ah di kota Sabang melalui investasi pada fasilitas perhotelan dan restoran telah memperluas basis pajak daerah, terutama dari pajak restoran, hiburan, dan reklame. Dengan demikian, investasi tidak hanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga secara langsung memperkuat penerimaan pajak daerah. Penelitian ini didukung oleh Akbar dan Juliannisa (2022) bahwa investasi berpengaruh pada peningkatan pajak daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah cenderung diikuti oleh meningkatnya kapasitas penerimaan pajak. Investasi juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga penguatan iklim investasi berpotensi memperluas basis pajak dan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah. Sementara itu, inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, yang mengindikasikan bahwa perubahan tingkat harga belum menjadi faktor penentu utama dalam variasi penerimaan pajak daerah pada periode pengamatan. Secara simultan, PDRB, inflasi, dan investasi bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh, sehingga ketiga variabel tersebut dapat

dipertimbangkan sebagai indikator penting dalam perumusan kebijakan peningkatan pendapatan daerah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada institusi pendidikan tinggi beserta para dosen yang telah memberikan arahan, pengetahuan, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan jurnal ini. Penghargaan juga diberikan kepada instansi yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar analisis. Selain itu, penulis berterimakasih kepada keluarga atas motivasi dan dukungan yang diberikan.

Referensi

- Aji, F. B., & Nugroho, S. B. M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/djoe.29995>
- Akbar, D. B. M., & Juliannisa, I. A. (2022). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(12), 1281–1294. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i12.556>
- Alfaisih, W. N., Utami, W. B., & Ma'ruf, M. H. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Kabupaten/kota Karesidenan Surakarta tahun 2014-2021. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 317–326. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.44>
- Alisman, Hanif, U., & Sufriadi, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 8(2), 116–124. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.830>
- Amaludin, T. A., & Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 123–137. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.162>
- Anggraeni, S., & Gazali, M. (2019). Determinan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 27(2), 635–637. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v20i1.744>
- Astuti, A., Den Ka, V. S., & Sari, S. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Makassar. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(2), 22–28.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk5lzl=-/ep-pdrb-004---seri-2010--pdrb-atas-dasar-harga-konstan--adhk--menurut-kabupaten-kota--dengan-migas-.html>
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2024). *Jumlah Inflasi di Provinsi Aceh*. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDMzlzl=/inflasi-tahun-ke-tahun.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Investasi menurut Provinsi di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzkzlzl=/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi--investasi-.html>

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). *Jumlah Pajak Daerah di Provinsi Aceh*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Imansyah, H., Sambodo, B., Alamsyahbana, M. I., Chandra, R. F., & Sahara, M. A. (2024). The Influence of Gross Regional Domestic Product, Number of Population, and Number of Nusantara Tourists on Regional Original Income. *Basic and Applied Accounting Research Journal*, 4(1), 93–104. <https://doi.org/10.11594/baarj.04.01.12>
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara |Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018). *Akuntansi Dan Pembangunan*, 19(2), 12–13. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32723.19.2.2018>
- Mawar, M., & Sroyer, S. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 40–53. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i1.135>
- Nicola, R. N., & Saleh, M. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 995. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11080>
- Putra, A. P., Harimurti, F., & Sunarti. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah 2014-2018. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 48(12), 34.
- Rizaldi, B., & Guspul, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Kedu 2014-2018. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 8–15.
- Sania, H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 74–86. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.68>
- Saniah, R., & Murtala, M. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(3), 31. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15182>
- Saputra, A. A. (2018). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota cilegon*. Universitas Islam Indonesia.
- Triastuti, D., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan/modal, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(1), 320–330.